BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab berikut, akan dijelaskan secara komprehensif mengenai lima elemen penting yang membentuk dasar penelitian ini. Pertama, Latar Belakang yang akan menggali konteks dan alasan di balik dilakukannya penelitian ini, serta menggambarkan situasi atau fenomena yang melatarbelakangi topik yang diangkat. Selanjutnya, Rumusan Masalah akan menguraikan permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini, serta pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dijawab melalui proses penelitian. Ketiga, Tujuan Penelitian akan memaparkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai, baik dalam bentuk penemuan baru, pemecahan masalah, atau pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Keempat, Manfaat Penelitian akan mengidentifikasi kontribusi atau keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, maupun kebijakan yang relevan. Terakhir, Struktur Penulisan akan memberikan gambaran tentang alur atau susunan bab-bab dalam penelitian ini, yang dirancang untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengikuti keseluruhan proses penelitian secara sistematis.

1.1 Latar Belakang

Linguistik forensik adalah pendekatan yang menerapkan pengetahuan linguistik pada sosial tertentu, yaitu forum hukum Coulthard (2010, hal. 213) Coulthard dan Johnson (2010), Johnson dan Coulthard (2010), Coulthard dkk. (2016) Olsson & Luchjenbroers (2013). Hal ini merupakan penghubung antara bahasa, kejahatan, dan hukum, yang mencakup penegakan hukum Cotterill (2002) Shuy dan Roger (2005) Oxburgh dkk. (2005), Oxburgh dkk. (2015), masalah peradilan Gray (2010), Galyashina (2016), legislasi Gibbons dan Turell (2008), Coulthard dkk. (2016), perselisihan atau proses hukum Tiersma dan Solan (2002), Butters Solan (2002), Butters (2011), dan bahkan sengketa yang melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau beberapa yang mencari solusi hukum Leonard (2006) Olsson dan Luchjenbroers (2013). Penerapannya

dapat mengakibatkan beberapa tindakan hukum Kredens dan Morris (2010), Northcott (2013).

Menurut Sumowardojo (1969) teks BAP adalah penyajian dalam bentuk tulisan dan lisan yang menyampaikan keterangan dengan menggunakan penyampaian yang tepat kepada penyidik bahwa ada pesan yang ingin disampaikan dari seorang tersangka atau saksi. Teks BAP yang disampaikan oleh saksi merupakan penyampaian informasi dalam menceritakan situasi yang sebenar-benarnya pada saat penyelidikan. Informasi yang terperiksa menyampaikan cerita atau situasi yang dialaminya dengan cara menyampaikan beberapa keterangan karena tersangka atau saksi memberikan keterangan yang jujur di depan penyidik. Teks BAP (Berita Acara Pemeriksaan) memiliki potensi untuk dedikasi secara linguistik karena teks ini menjadi bahan rujukan untuk pemaparan keterangan. Dua tujuan Utama yang paling penting dari Penyidik polisi adalah pencarian kebenaran dan pengambilan pernyataan. Karena kegiatan ini biasanya dilakukan secara bersamaan, pembicaraan dalam interogasi harus dikoordinasikan dengan pengetikan laporan polisi Komter (2002, hal.3).

Alat bukti tertulis yang dihasilkan oleh penyidik atau disebut BAP terdiri atas beberapa tanya jawab antara penyidik dan orang yang diperiksa, dan unsur-unsur Pasal adalah: Akan diajukan tuntutan pidana. Penyusunan BAP merupakan bagian terpenting dalam penyidikan tindak pidana. Tugas penyidik sangat sukar untuk memperjelas perkara tersebut, sehingga dalam menyusun BAP, penyidik mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang teori hukum pidana, hukum pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian. Penggunaan bahasa juga sangat berpengaruh, karena orang yang disurvei berasal dari status sosial berbeda dan wilayah berbeda. Penggunaan bahasa yang tepat sangat berpengaruh dalam terjalinnya komunikasi yang baik antara penyidik dan orang yang diperiksa guna memperoleh informasi yang relevan terkait dengan suatu perkara pidana.

Saksi dalam hukum pidana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan, serta untuk pemeriksaan perkara pidana. Pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal Pidana, yaitu keterangan saksi yang menjelaskan sebab-sebab mengetahuinya suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Saksi itu sendiri kepentingannya adalah mengungkap sebuah kejahatan dalam arti bahwa kehadirannya adalah untuk menjelaskan secara lebih maksimal dan utuh.

Pelbagai jenis modalitas telah digunakan dalam proses persidangan. Tata bahasa fungsi gramatikal memainkan peran penting bagi kebenaran kesaksian para saksi di kursi saksi. Dalam cakupannya, modalitas didefinisikan sebagai kategori yang memperkuat proposisi, proposisi pembicara berdasarkan pernyataan mereka Adha (2020). Seperti yang dikemukakan oleh Palmer (2001) dan Narrog (2009), modalitas mengkualifikasikan isi faktual dari ujaran seseorang, untuk menentang kemungkinan dan keharusan Van der Auwera dan Plungian (1998), dan menyajikan subjektivitas pembicara subjektivitas pembicara Halliday (1970), Lyons (1977), Palmer (1986).

Pemanfaatan modalitas dan fungsinya telah dieksplorasi dalam istilah hukum. Misalnya Ballesteros-Lintao dkk. (2016) mengidentifikasi penggunaan yang salah dari penggunaan modalitas *shall* yang mengakibatkan kesalahpahaman kontrak yang tercermin pada kasus-kasus yang diajukan di pengadilan Filipina. Zelenka (2013) mengkaji modalitas dalam dokumen hukum bahwa modalitas *shall* digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan dalam dokumen hukum. Di antara modalitas yang sering digunakan, *may* adalah polisemi yang memberikan makna yang ambigu Huisman dan Blackshield (2014). Demikian pula, beberapa penelitian membahas pelbagai aspek linguistik forensik seperti ruang sidang pengadilan Hale (1999), Catoto (2017), identifikasi kepengarangan Grant (2008), Nieto dkk. (2008), dan identifikasi *online* Grant dan Macleod (2016).

Penelitian mengenai modalitas telah banyak dilakukan untuk menganalisis kegiatan bahasa yang berpotensi berdampak pada hukum. Misalnya Amrullah, Yassi, dan Gusnawaty (2020) mengkaji modalitas dalam teks berita hoaks: kajian linguistik sistemik fungsional dengan hasil analisis menunjukkan total 74 klausa dari 11 berita hoaks pada Laporan Hoaks Pileg dan Pilpres Subdit Pengendalian Konten Internet Periode Agustus 2018 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan yang mengandung modalitas sebanyak 47.30% dengan penanda modalitas sebanyak 62.16%. Dari hasil analisis modalitas diketahui teks berita hoaks dominan menggunakan modalisasi ‘kemungkinan’ derajat menengah sebesar 20.27% yang mengindikasikan bahwa informasi tersebut belum tentu terjadi dan pembuat maupun penyebar berita hoaks tidak meyakini atau kurang mengetahui kebenaran informasi yang disajikan.

Penelitian lainnya yaitu Ndumia dan Ireri (2022) melakukan kajian *Forensic-linguistic Analysis of Grammatical Modality Features in Kenya Supreme Court judgements*. Studi ini menetapkan bahwa kategori modal deontik digunakan di Mahkamah Agung untuk mengartikulasikan sifat preskriptif dari wacana hukum. Kata kerja modal seperti ‘*shall*’, ‘*must*’, ‘*should*’, ‘*ought to*’, ‘*need to*’, ‘*have to*’ dan ‘*had better*’ digunakan dalam putusan untuk mengartikulasikan kewajiban, izin, dan wewenang yang terkait dengan pelbagai ekspektasi hukum. Kedua, fitur modalitas dinamis (*can, could, would, shall, will*) digunakan dalam putusan Mahkamah Agung untuk menandakan kemampuan, kemauan, niat, dan kesediaan.

Penelitian lainnya Abdulaal (2022) mencoba menyoroti beberapa epistemik dan kesalahan modalitas deontik dalam beberapa ayat terjemahan Surah Al-Kahfi (18:1-21). Investigasi modalitas ini adalah dilakukan dalam kerangka teoretis nilai-nilai dan realisasi modalitas Inggris dan Arab sistem yang ditetapkan oleh Halliday dan Matthiessen (2004) dan Angheliescu (1999). Hasilnya menunjukkan bahwa, pertama, penerjemah tidak boleh menggunakan

modal kemungkinan epistemik bahasa Inggris dengan nilai rendah ketika menerjemahkan kata kerja bahasa Arab suasana subjungtif.

Selanjutnya, Jayadi (2020) meneliti kehadiran seorang saksi dalam memberikan kesaksian dalam ranah tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting oleh karena dialah salah satu alat bukti yang akan membuktikan benar tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian saksi harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak memahami dan tidak mau menjadi saksi atau bersaksi terhadap terjadinya sebuah tindak pidana karena menjadi saksi itu sangat problematik sebab bila salah bersaksi maka justru bisa berbalik menjadi tersangka. Hal tersebut semakin diperparah dengan masih adanya persepsi masyarakat yang buruk terhadap aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) sehingga takut menjadi saksi dan memberikan kesaksian.

Menurut Ijam dan Al-Ameedi (2024) pendekatan linguistik fungsional sistemik, yaitu metafungsi interpersonal, digunakan dalam penelitian ini, untuk membantu dalam menggambarkan pengalaman pengorbanan ibu dan mengungkapkan hal yang sesuai pilihan leksikogramatikal untuk menyoroti pengalaman itu. Hal ini dicapai dengan mendeteksi Mood dan Modalitas sistem dalam kutipan dari novel yang mewakili pengalaman itu. Hal ini bertujuan menunjukkan bagaimana pengorbanan seorang Ibu diwujudkan secara linguistik melalui metafungsi interpersonal menurut Halliday dan Matthiessen (1986) kerangka. Penelitian ini mengadopsi pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif untuk analisis. Para peneliti menemukan bahwa metafungsi interpersonal melalui sistem Mood dan Modalitas mengungkapkan pengalaman pengorbanan ibu sebagai sebuah pengalaman pilihan, dan representasi yang paling tepat dari pengalaman ini adalah pendekatan linguistik fungsional sistemik.

Selanjutnya, Linh dan Chinh (2024) melakukan analisis kontrastif terhadap Modalitas dalam Undang-undang Vietnam dan Singapura bertindak berdasarkan Tata Bahasa Fungsional Sistemik. Secara khusus, peneliti menganalisis Modalisasi dan Modulasi ditinjau dari Probabilitas, Kebiasaan, Kewajiban dan Kecenderungan. Studi menunjukkan bahwa Modalisasi dan Modulasi telah digunakan untuk mewujudkan sistem Modalitas dalam dua teks hukum yang disurvei. Selain itu, kedua teks hukum tersebut menggunakan ukuran besar sejumlah operator modal terbatas untuk mewujudkan Kewajiban dalam Modulasi. Singapura *Companies Act* cenderung menggunakan lebih banyak operator modal terbatas ketika mengekspresikan Modalitas. Selain itu, Undang-undang Vietnam mempekerjakan lebih banyak operator modal tinggi sebagai ekspresi Kewajiban dibandingkan Undang-Undang Singapura.

Penelitian ini diuji dengan menggunakan teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang terfokus pada modalitas. Modalitas merupakan perwujudan makna interpersonal yang memungkinkan penutur mengungkapkan pandangan, refleksi, atau pendapat pribadinya mengenai pesan yang disampaikan dalam interaksi Saragih (2006). Melalui modalitas, sikap penutur dapat ditentukan dengan membedakan apakah tuturan yang dihasilkan penutur berupa proposal atau proposisi. Proposal merupakan rencana yang telah dikembangkan dengan baik, biasanya tertulis. Sedangkan proposisi merupakan pernyataan atau saran yang dapat dianggap benar atau salah. Tuturan penutur berbentuk proposisi jika klausanya menyangkut keterangan yang berupa pernyataan atau pertanyaan, sedangkan berbentuk proposal jika klausanya menyangkut barang dan jasa kekhawatiran dalam bentuk pesanan atau penawaran Wiratno (2018).

Untuk memperluas kajian modalitas dalam konteks hukum, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana fungsi modalitas direalisasikan oleh penyidik dan saksi dan signifikansi penggunaan modalitas untuk menegosiasi perkara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa sajakah jenis modalitas yang digunakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)?
2. Bagaimanakah realisasi modalitas mempengaruhi pemeriksaan kesaksian Penyidik dan kesaksian Saksi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jenis modalitas yang digunakan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan)
2. Untuk mengetahui realisasi modalitas merekonstruksi pemeriksaan kesaksian kasus

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Pemahaman Penggunaan Modalitas: Penelitian ini memberikan pemahaman tentang penggunaan dan fungsi modalitas.
2. Kontribusi terhadap penelitian modalitas: Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep modalitas khususnya dalam bahasa Indonesia.
3. Pengembangan penelitian lebih lanjut: Hasil penelitian ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai penggunaan modalitas dalam wacana bahasa Indonesia dan lainnya dengan perspektif berbeda.

1.5 Struktur Penulisan

Nida Nabillah, 2025

*ANALISIS MODALITAS DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI KASUS LAKA LANTAS:
PENDEKATAN LINGUISTIK FORENSIK*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tesis ini terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut: (1) BAB I yang berfungsi sebagai pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, merumuskan masalah penelitian, mengidentifikasi tujuan penelitian, mengemukakan manfaat penelitian, memberikan definisi operasional, dan menguraikan struktur penulisan tesis. (2) Selanjutnya, BAB II berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Fokus utama teori adalah konsep transitivitas dari perspektif sistemik linguistik fungsional. (3) Pada BAB III, memaparkan metodologi penelitian dengan terperinci, mencakup desain penelitian, sumber informasi yang digunakan, teknik pengumpulan informasi, dan metode analisis informasi. (4) BAB IV memuat deskripsi dan pembahasan temuan informasi yang merespon pertanyaan penelitian dari bab awal. (5) Bab terakhir, yaitu BAB V, berisi simpulan yang diambil dari tinjauan pada bab keempat, disertai dengan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat berguna bagi penelitian-penelitian di masa mendatang.